

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung; Alumni.
- Bambang Antariksa, 2016, *Qanun Bendera dan Lambang Aceh di Persimpangan Jalan, Validitas Produk Hukum daerah Dalam Perspektif Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Medan: Sofmedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Malang: Setara Press kerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang; Setara Press.
- Hajar M, 2017, *Model Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta; kalimedia.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta; Erlangga.
- I made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta; Kencana.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Jakarta; Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta; Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta; Konstitusi Press.
- Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta; Kanisius.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta; Kanisius.
- Maria Farida et al., 2016, *Teori Perundang-Undangan*, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.
- Mashuri Mashab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta; Polgov, Fisipol UGM.
- Munir Fuady, 2012, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media,
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press.
- Ni'matul Huda. 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan III, Bandung; Nusa Media.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang; Setara Press.
- Nomensen Sinamo, 2016. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta; Jala Permata Aksara
- Nur Basuki minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Laksbang Mediatama,
- Ramlan, Eka NAM Sihombing, 2021, *Hukum pemerintahan Desa*, Medan; Enam Media.
- Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*, Depok; Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-VI, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta; PN Balai Pustaka.

- Suryanef dan Al Rafni, 2005, *Kembali Ke Nagari, Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal*, Jamil Gunawan dkk (Editors), Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, Jakarta; LP3ES.
- Sutoro Eko, 2005, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta; Institute for Local Development dan Yayasan Tifa.
- Taufiqurohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta; Kencana.
- W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta; Buku Mojok.

## **Jurnal**

- Abrianto, Bagus Oktafian, 'Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, 26.3 (2011)
- Agustin, Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar, 'Kedudukan Hukum Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Legal Status of the Country Regulatory in the Regulatory System', 1.1 (2019), 85–98
- Antariksa, Bambang, Fakultas Hukum, Universitas Sains, and Cut Nyak, 'Penerapan Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia', 1.1, 24–41
- Asshiddiqie, Jimly, 'Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)', 2017, 1–21
- Astomo, Putera, 'Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Position and Constitutional Review Of', 15 (2018)
- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Malang: Setara Press kerjasama

- dengan pusat kajian konstitusi Universitas Kanjuruhan, 2010)
- Elviandri, Indra Perdana, 'PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)', 2021
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, Dewi Sandra, 'Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3 (2) (2019), 256–72
- Kartono, Kartono, and Universitas Jenderal Soedirman, 'PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG', April, 2021
- Kokotiasa, Wawan, 'Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, V2.11', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2576.2 (2021), 11–23
- Luthfy, Riza Multazam, 'Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.4 (2021), 492
- Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka., 'Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Legal Opinion*, 6.3 (2018), 255
- Sakti, Lanang, 'Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan the Authority of Supervision and Regulation On', 2016
- Sholikin, M Nur, 'Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan PERDA; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA', *Rechtsvinding*, June, 2017, 1–6
- Simarmata, Jorawati, and Damai Magdalena, 'Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait ( Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2015), 1–28
- Simatupang, Taufik H., 'Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.2 (2019), 217

Wijayanto, Kadek, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M Wantu, 'PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL', 4.2 (2020)

Zainudin, Arif, 'Model Kelembagaan Pemerintahan Desa', *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1.2 (2016), 338–51

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

### **Berita**

Hallo Jendela, Eksistensi Peraturan Desa, (2018),  
<https://jendelahukum.com/eksistensi-peraturan-desa/#>,